



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: <b>Badan Ekonomi Kreatif RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 17 Januari 2018.</b>
Pukul	: <b>14.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, SE., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018;</b> <b>2. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017;</b> <b>3. Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya, dan Fashion (K2F); dan</b> <b>4. Lain-lain.</b>
Hadir	: 40 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Triawan Munaf/Kepala Bekraf RI beserta jajarannya.

I. **PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 16.35 WIB oleh Ferdiansyah, SE., M.M./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dan pandangan dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

A. **Badan Ekonomi Kreatif RI menyampaikan beberapa hal antara lain:**

1. **Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018**

- 1) Dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN TA 2018, Bekraf RI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pengelola keuangan telah diberi pembekalan melaksanakan dan mengelola kegiatan serta menyiapkan pertanggungjawabannya.
  - b. Kegiatan-kegiatan yang jadwalnya tidak terikat dengan pihak luar akan dilaksanakan sebisa mungkin diawal tahun. Hal ini untuk menghindari penumpukan kegiatan diakhir tahun.
  - c. Revisi anggaran yang di bintang diprioritaskan pada kegiatan yang outputnya dikategorikan sebagai output cadangan.
  - d. Meningkatkan kemampuan layanan pengadaan barang dan jasa serta mengoptimalkan pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik yang sudah ada.
  - e. Menggunakan sistem pengelolaan kegiatan secara terpadu dan *online* yang disebut dengan Papan Bekraf.
- 2) Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN TA 2018 telah dijabarkan ke sasaran program dan target masing-masing deputi, sebagaimana tercantum dalam bahan rapat halaman 53-55.

2. **Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017**

- 1) Realisasi daya serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 per 31 Desember 2017 sebesar 81,14% (Rp**569,953** miliar dari total pagu Rp702,395 miliar) lebih rendah 10,86% dari target yang ditetapkan sebesar 92%.
- 2) Terhadap realisasi daya serap sebagaimana dimaksud angka (1), Bekraf RI memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Belanja barang yang ada diprogram dukungan manajemen yang tidak dapat digunakan karena masuk dalam mata anggaran layanan perkantoran yang peruntukannya tidak bisa direvisi.
  - b. Belanja pegawai yang ada di program dukungan manajemen tidak terserap karena CPNS baru akan mulai masuk bulan januari tahun 2018.
  - c. Kenaikan tunjangan kinerja yang direncanakan mulai bulan juni tahun 2017 belum terealisasikan.
  - d. Belanja barang di program pengembangan ekonomi kreatif tidak terserap disebabkan:
    - i. Ada kegiatan revitalisasi infrastruktur yang tidak terselesaikan akibat penyedia yang tidak kompeten, serta belum adanya pengalaman mengelola kegiatan bantuan pemerintah untuk revitalisasi.
    - ii. Ada kegiatan yang tidak terlaksana akibat sempitnya waktu.
    - iii. Terjadi penghematan disaat proses pengadaan.

3. **Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya, dan Fesyen (K2F) Tahun 2017.**

- a. Bekraf RI menyampaikan capaian program unggulan K2F sebagai berikut:

Subsektor	Pertumbuhan	
	Tahun 2015	Tahun 2016
Kuliner	4,00 %	4,75 %
Kriya	4,54 %	2,38 %
Fesyen	2,78 %	4,04 %

- b. Dari program unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F), subsektor Kuliner (1.969 pelaku) dan subsektor Fesyen (850 pelaku) masuk dalam 3 subsektor dengan jumlah terbanyak aplikasi *Bekraf Information System in Mobile Application* (BISMA), sementara subsektor Kriya hanya 577 pelaku dari total 6.261 pelaku ekonomi kreatif.
- c. Dari sisi *Trend Forecasting*, subsektor Kriya dan subsektor Fesyen menjadi subsektor yang diperkirakan akan menjadi *trend* dimasa yang akan datang.
- d. Dari sisi Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I), pada tahun 2017 terdapat; 3 kabupaten/kota untuk subsektor kuliner, 7 kabupaten/kota untuk subsektor kriya, dan 2 kabupaten/kota untuk subsektor fesyen.

Data terkait huruf d akan segera disampaikan oleh Bekraf RI

**B. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI adalah sbb:**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian PDB Ekraf tahun 2015 ke 2016 sebesar 4,41% ke 4.95 %, dan PDB Nasional tahun 2015 ke 2016 sebesar 4.88 % ke 5.02 %. Capain ini menunjukkan pertumbuhan PDB Ekraf mendekati capaian pertumbuhan PDB Nasional.
2. Dengan pagu definitif APBN TA 2018 sebesar Rp746,158 milyar, Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk melakukan langkah-langkah strategis, terukur dan terkontrol agar target PDB, Serapan Tenaga Kerja, Nilai Ekspor Bruto dan target lainnya dapat tercapai. Selanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong agar daya serap APBN TA 2018 lebih tinggi dari capaian tahun 2017 atau sesuai target yang ditetapkan, minimal 88 %.
3. Dalam rangka mewujudkan target dan pengembangan program unggulan K2F, Komisi X DPR RI mendorong Bekraf RI untuk melakukan evaluasi terhadap program unggulan K2F, khususnya subsektor kriya, pada tahun 2017 dan rencana tahun 2018 dengan memperkuat faktor pendukung pengembangan K2F, seperti diantaranya penguatan potensi daerah, peningkatan SDM, ketersediaan bahan baku, pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI), dan promosi.
4. Komisi X DPR RI menekankan agar kegiatan berskala besar pada tahun 2018, seperti *World Conference on Creative Economy (WCCE)*, keikutsertaan dalam penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, Calender of Event Pariwisata 2018, keikutsertaan dalam penyelenggaraan *IMF-World Bank Annual Meeting*, dan Bekraf Festival di Surabaya, harus benar-benar memiliki dampak positif terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya di daerah yang menjadi tuan rumah.

5. Dalam rangka mendorong industri perfilman nasional, Komisi X DPR RI menekankan Bekraf RI untuk melakukan penguatan pelaksanaan sistem *Box Office* terintegrasi, agar adanya transparansi data penonton film Indonesia dan film impor. Selanjutnya Bekraf akan menyampaikan *Grand Design* sistem *Box Office* kepada Komisi X DPR RI
6. Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lambat pada tanggal 29 Januari 2018 terhadap poin II.B.2 s.d. 5 dan seluruh tanggapan/masukan/pertanyaan dan pengantar yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **18.55** WIB

KEPALA BEKRAF RI  
  
TRIAWAN MUNAF

KETUA RAPAT,  
  
FERDIANSYAH, SE., MM